



**BALAI PENGEMBANGAN PAUD DAN DIKMAS
NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2015 - 2019**

RENCANA STRATEGIS

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
BP PAUD DIKMAS NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

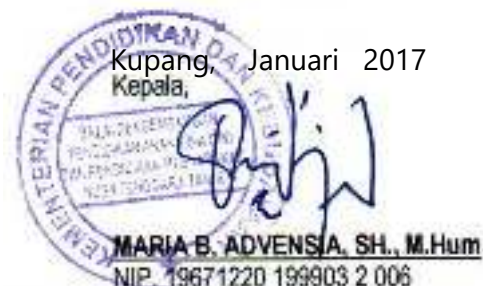
Rencana Strategis (Renstra) BP PAUD dan Dikmas Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015-2019 disusun berdasarkan Rencana Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019 dan Rencana Strategis Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015-2019.

Dalam penyusunan Renstra ini juga mempertimbangkan tugas BP PAUD dan Dikmas Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan pemetaan mutu pendidikan, pengembangan program, supervisi, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program, dan pengembangan sumber daya serta pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan bagi masyarakat.

Renstra BP PAUD dan Dikmas Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dasar dan pedoman bagi pejabat di lingkungan BP PAUD dan Dikmas Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sebagai acuan dalam menyusun (1) Rencana Kerja (Renja) Tahunan; (2) Program dan kegiatan pembangunan lintas sektoral bidang PAUD dan Dikmas secara terukur dan terarah; (3) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup BP PAUD dan Dikmas di wilayah kerja BP PAUD dan Dikmas; (4) Laporan Tahunan; dan (5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Selain itu, Renstra ini merupakan acuan dalam upaya pencapaian target dan sasaran pembinaan layanan pendidikan anak usia dini, pembinaan layanan kursus dan pelatihan, pembinaan layanan pendidikan masyarakat, dan pembinaan lainnya agar program-program tersebut dapat berjalan secara efektif sesuai mekanisme yang ada. Akhirnya semoga rencana strategis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Kupang, Januari 2017
Kepala,



MARIA B. ADVENSIA, SH., M.Hum
NIP. 19671220 199903 2 006

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	3
C. Landasan Filosofis.....	3
D. Pilar-pilar Strategis.....	5
BAB II KONDISI UMUM	
A. Kondisi Program PAUD dan Dikmas.....	6
B. Potensi dan Permasalahan.....	16
BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI	
A. Visi.....	22
B. Misi.....	23
C. Tujuan.....	25
D. Strategi.....	27
BABIV ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA REGULASI, KERANGKA PENDANAAN, DAN KELEMBAGAN	
A. Arah Kebijakan.....	30
B. Kerangka Regulasi.....	31
C. Kerangka Pendanaan dan Kerangka Kelembagaan.....	32
BAB V PENUTUP.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Negara Republik Indonesia (RPJM) Tahun 2015-2019 ditegaskan bahwa ideology pemersatu bangsa adalah Pancasila yang diwujudkan antara lain dalam kepribadian dan kebudayaan, melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar realitas kebhinekaan. RPJMN 2015-2019 telah menetapkan Sembilan agenda prioritas, yang dikenal sebagai Nawacita, yang sepenuhnya berlandaskan ideology Trisakti.

Ideologi Trisakti mencakup kedaulatan dibidang politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sementarai itu Nawacita meliputi :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BP PAUD dan Dikmas mempunyai tugas melaksanakan pengembangan program dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut BP-PAUD dan Dikmas menyelenggarakan fungsi:

- (1) Pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- (2) Pemetaan mutu pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- (3) Supervisi satuan pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- (4) Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- (5) Pengembangan sumber daya pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- (6) Pengelolaan system informasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
- (7) pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- (8) Pelaksanaan urusan administrasi BP PAUD dan Dikmas.

Berbagai kebijakan dan program PAUD-Dikmas disusun untuk memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik untuk masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas sangat erat terkait dengan partisipasi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Sinergitas antara pemerintah baik pusat maupun daerah seperti lembaga/organisasi pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan, satuan pendidikan serta dengan seluruh pemangku kepentingan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program yang telah disusun karena merupakan hal yang terdepan.

Untuk memberikan arah pelaksanaan program pendidikan, perlu disusun Rencana Strategis Pendidikan BP PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019 guna memberikan arah kebijakan dan pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di daerah Nusa Tenggara Timur. Renstra ini menguraikan kondisi saat ini dan analisis situasi, tantangan, peluang dan hambatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan, serta anggaran yang diperlukan BP-PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2015-2019.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Tahun 2015-2019 BP PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Timur adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 14 tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Permendikbud Nomor 17 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019;
8. Permendikbud Nomor 22 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas BP PAUD dan Dikmas.

C. LANDASAN FILOSOFIS

Belajar sepanjang hayat adalah merupakan prinsip dasar penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Belajar sepanjang hayat bahwa proses belajar terjadi seumur hidup, walaupun dengan cara yang berbeda dan proses yang berbeda. Tujuan layanan pendidikan nonformal adalah untuk mendapatkan layanan pendidikan yang tidak diperoleh dari pendidikan formal. Keberadaan pendidikan nonformal dan informal memainkan peran sebagai pengganti, pelengkap atau penambah dari pendidikan formal.

Dengan adanya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat adalah merupakan pendidikan yang terjadi secara nonformal dan informal. Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat antara lain :

1. Pemberdayaan Manusia Seutuhnya : adalah memperlakukan peserta didik sebagai subjek yang memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam aspek kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, sosial dan kinestetik. Paradigma ini merupakan fondasi dari pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk berhasil sebagai pribadi yang mandiri (makhluk pribadi).
2. Pembelajaran Sepanjang Hayat Berpusat pada Masyarakat : pembelajaran merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka. Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung secara terbuka melalui jalur formal, nonformal dan informal, yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat setiap saat, tidak dibatasi usia, tempat dan waktu.
3. Pendidikan Untuk Semua : dimana setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan

dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

4. Pendidikan sebagai suatu gerakan : dimana Pemerintah bertanggungjawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Diharapkan semua pihak dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat.
5. Pendidikan menghasilkan pembelajaran, penyelenggaraan pendidikan harus memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajaran diri yang bertanggungjawab, kreatif dan inovatif.
6. Pendidikan membentuk karakter: pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, dan pembentukan kepribadian, kepribadian dengan karakter unggul, antara lain kejujuran, berakhlak mulia, mandiri serta cakap dalam menjalani hidup.
7. Sekolah yang menyenangkan: sekolah sebagai satuan pendidikan yang utama merupakan suatu ekosistem. Suatu tempat yang didalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya.

D. PILAR-PILAR STRATEGIS

Dalam menyelenggarakan program di BP-PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Timur, kerangka dasar yang menjadi rujukan dalam implementasi landasan filosofis pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengacu pada strategi pembangunan pendidikan nasional. Strategi pembangunan PAUD dan Dikmas akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pokok dan kerangka implementasi program dan kegiatan pembaruan pendidikan yang akan dilaksanakan oleh BP-PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Timur beserta seluruh pihak yang berkepentingan (Pimpinan/pihak manajemen dan seluruh Pegawai)/steakholder baik dipusat maupun di daerah yang meliputi :

1. Pendidikan agama, akhlak mulia dan pembentukan karakter/kepribadian masyarakat yang mandiri serta memiliki daya saing;
2. Proses pembelajaran yang mendidik, dialogis serta pembelajaran berpusat pada peserta didik dan kontekstual;
3. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi yang selaras dengan dunia kerja;
4. Peningkatan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Penyediaan sarana belajar;
6. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
7. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka, merata, berkelanjutan;
8. Pemberdayaan masyarakat, organisasi masyarakat dan asosiasi profesi;
9. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan.

BAB II

KONDISI UMUM

A. KONDISI PROGRAM PAUD DAN DIKMAS

Secara ideal penyusunan Rencana Strategis BP PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019 perlu memperhatikan capaian rencana strategis sebelumnya, tujuannya ada digambarkan umum tentang kondisi yang ada sebagai pijakan untuk membuat semua rencana program dan memperbaiki kondisi tersebut menuju kondisi yang dicita-citakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Sehubungan dengan adanya perubahan tugas pokok dan fungsi BP PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Timur yang sebelumnya bernama UPT PPNFI-PK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda, maka penyusunan rencana strategis harus menyesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat atau dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu pula, penyusunan rencana strategis menggunakan analisis yang bersifat diagnostik dan analisis prospektif. Analisis diagnostik dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelebihan dan kelemahan dalam kondisi yang ada. Sedangkan analisis prospektif dilakukan untuk memperoleh gagasan-gagasan pengembangan untuk mengubah kondisi yang ada menjadi kondisi yang diinginkan.

Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities dan Threats) untuk mengetahui kondisi internal yaitu kekuatan dan kelemahan serta kondisi eksternal yaitu peluang dan ancaman/tantangan. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Analisis SWOT

dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktor tersebut.

1. Kondisi program PAUD dan DIKMAS di Nusa Tenggara Timur

Wilayah kerja BP PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan mencakup 21 (dua puluh satu) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yakni Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kota Kupang. Kondisi penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini dan program pendidikan masyarakat lainnya secara umum dapat dilihat pada uraian berikut :

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah pendidikan yang memberikan pengasuhan, perawatan, dan pelayanan kepada anak usia 0-6 tahun. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak usia 0-6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki sekolah dasar dan kehidupan tahap berikutnya.

Berdasarkan data dapodik PAUD dan Dikmas Tahun 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 diketahui bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki lembaga PAUD sebanyak 5.239 satuan PAUD, yang terdiri dari 1.718 Taman Kanak-kanak (TK), 3.166 Kelompok Bermain (KB), 26 Taman Penitipan Anak (TPA), dan 329 Satuan PAUD Sejenis (SPS).

Dengan jumlah lembaga PAUD yang cukup banyak tersebut maka secara otomatis Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki jumlah tenaga Pendidik atau guru dan Tenaga Pengelola PAUD yang banyak pula. Kondisi ini menyebabkan perlu adanya peningkatan kompetensi tenaga kependidikan pada satuan PAUD. Terlebih pada PAUD nonformal yang secara umum masih didukung dengan tenaga kependidikan yang belum memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai.

b. Pendidikan keaksaraan

Pendidikan keaksaraan adalah pendidikan yang diberikan kepada masyarakat yang belum pernah memperoleh pendidikan atau drop out dari sekolah dasar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dasar, kemampuan baca tulis fungsional yang diintegrasikan dengan mata pencarian, dalam arti agar sedapat mungkin diusahakan belajar pendidikan dasar yaitu membaca, menulis, berhitung dilaksanakan secara terpadu dengan pendidikan mata pencarian dan diikuti dengan kegiatan berusaha.

Sasaran program Pendidikan Keaksaraan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 sebagai berikut

Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke atas menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2015	2016	2017
Sumba Barat			
Sumba Timur	19,73	15,91	17,67
Kupang	7,47	9,46	9,35
Timor Tengah Selatan	8,65	9,30	8,16
Timor Tengah Utara	14,18	14,96	13,21

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2015	2016	2017
Alor	5,01	4,56	4,43
Lembata	6,29	5,02	3,14
Flores Timur	8,29	5,98	6,29
Sikka	7,07	8,29	9,89
Belu	12,67	12,55	11,47
Ende	4,41	6,03	3,14
Ngada	2,84	1,49	1,81
Manggarai	5,93	5,86	5,62
Rote Ndao	8,24	9,09	9,71
Manggarai Barat	4,22	3,99	4,72
Sumba Tengah	11,11	11,09	18,08
Sumba Barat Daya	18,94	20,88	21,83
Nagakeo	5,35	5,70	4,97
Manggarai Timur	3,09	4,33	4,66
Sabu Raijua	13,21	13,36	11,20
Malaka	19,54	14,82	14,89
Kota Kupang	1,29	0,51	1,02
Nusa Tenggara Timur	8,55	8,48	8,32

Sumber : Hasil statistik Pendidikan 2017 oleh Badan Statistik Provinsi NTT

Masih tingginya angka /prosentase jumlah penduduk buta aksara ini menjadi tantangan tersendiri bagi Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Timur untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurangnya. Penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan fungsional melalui kelompok belajar pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), SKB/SPNF, maupun satuan pendidikan lainnya

merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas angka buta aksara.

c. Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan yang ditujukan kepada warga negara yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal di sekolah. Biasa dikenal dengan nama Kejar (Kelompok Belajar) Paket A untuk setara SD, Paket B untuk setara SMP, dan Paket C untuk setara SMA. Sebagian besar program pendidikan kesetaraan di Provinsi Nusa Tenggara Timur diselenggarakan oleh PKBM, SKB/SPNF, LSM, perorangan, yayasan, maupun stake holder terkait lainnya. Berdasarkan data hasil susenas tahun 2017, prosentase penduduk Nusa Tenggara Timur usia 7 – 24 tahun yang putus sekolah dan tidak bersekolah lagi yang menjadi sasaran program kesetaraan baik Paket A,B maupun C sebanyak 23,14 %

Persentase Penduduk usia 7-24 Tahun yang Putus sekolah dan Tidak Bersekolah Lagi menurut Kabupaten /Kota

Kabupaten/Kota	Persentase Tidak Bersekolah
Sumba Barat	20,43
Sumba Timur	27,73
Kupang	23,34
Timor Tengah Selatan	25,00
Timor Tengah Utara	22,22
Belu	24,80
Alor	26,12
Lembata	22,92
Flores Timur	21,92
Sikka	27,16
Ende	27,85

Kabupaten/Kota	Persentase Tidak Bersekolah i
Ngada	23,57
Manggarai	22,77
Rote Ndao	20,57
Manggarai Barat	23,44
Sumba Tengah	21,99
Sumba Barat Daya	19,56
Nagakeo	18,56
Manggarai Timur	20,92
Sabu Raijua	19,24
Malaka	21,09
Kota Kupang	21,26
Nusa Tenggara Timur	23,14

d. Pengembangan Budaya Baca

Budaya baca adalah suatu sikap dan tindakan atau perbuatan seseorang untuk membaca yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan. Pengertian budaya baca ini mencakup kebiasaan dan proses didalam waktu yang lama didalam kehidupan seseorang untuk selalu menggunakan sebagian waktu untuk membaca. Data Taman Bacaan Masyarakat Di Wilayah kerja BP-PAUD dan DIKMAS Nusa Tenggara Timur keadaan Tahun 2017 sebanyak 156 lembaga yang diselenggarakan oleh PKBM, SKB/SPNF dan Yayasan maupun Ormas dan LSM

Keberadaan Lembaga TBM di tengah-tengah masyarakat secara langsung dapat meningkatkan kemampuan membaca maupun literasi bagi masyarakat. BP PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Timur perlu

berperan aktif dalam optimalisasi penyelenggaraan TBM agar mereka mampu berperan aktif dalam membangun masyarakat menuju era digital yang semakin maju. Sumber pembiayaannya berasal dari APBN,APBD maupun mandiri/swadaya pengelola.

e. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan Perempuan adalah upaya perempuan untuk memperoleh akses dan control terhadap sumber daya,ekonomi,politik, sosial budaya,agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan kepercayaan diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep dirinya.

Dari data diatas dapat dilihat adanya peningkatan jumlah perempuan yang telah melek aksara. Dengan demikian program pemberdayaan perempuan sangatlah penting,mengingat hak asasi perempuan harus dihargai. Pendidikan Pemberdayaan perempuan bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan usia 15 tahun keatas, melalui upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bermanfaat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik agar perempuan dapat berperan aktif dalam proses pembangunan keluarga,masyarakat dan bangsa. Sasaran pendidikan pemberdayaan perempuan adalah perempuan miskin 15 tahun ke atas termasuk lanjut usia,perempuan rawan trafficking dan perempuan yang sedang dan atau selesai mengikuti program keaksaraan.

f. Kursus dan Pelatihan

Kursus adalah pelajaran tentang suatu pengetahuan dan keterampilan yang diberikan dalam waktu singkat. Pelatihan setiap usaha untuk memperbaiki prestasi kerja pada suatu pekerjaan tertentu yang

sedang menjadi tanggungjawabnya. Data terakhir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diketahui bahwa lembaga Kursus dan Pelatihan di NTT tahun 2017 tercatat sejumlah 469 LKP dengan jumlah tenaga pendidik 1.161 orang. Dengan jumlah lembaga LKP yang besar diharapkan mampu berperan dalam meningkatkan keterampilan masyarakat yang siap bekerja di dunia usaha maupun dunia industri.

Oleh karena itu BP PAUD dan Dikmas NTT perlu secara terus menerus menyelenggarakan program-program bagi LKP agar mereka mampu:

1. Meningkatkan ketersediaan layanan penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang merata, bermutu, dan berkeadilan bagi masyarakat untuk dapat bekerja atau berusaha mandiri (berwirausaha);
2. Meningkatkan ketersediaan jumlah penguji kompetensi kursus dan pelatihan yang profesional;
3. Meningkatkan ketersediaan jumlah lembaga kursus dan pelatihan rintisan dipedesaan;
4. Meningkatkan kapasitas lembaga kursus ditingkat nasional dan internasional untuk meningkatkan daya saing lembaga dan lulusan;
5. Meningkatkan ketersediaan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
6. Meningkatkan jumlah standart mutu penyelenggaraan kursus dan pelatihan untuk dan program pendidikan kewirausahaan masyarakat;
7. Meningkatkan jumlah sasaran penilaian kinerja lembaga kursus dan pelatihan untuk membantu mempercepat akreditasi lembaga kursus dan pelatihan;
8. Meningkatkan penerapan sistem pembelajaran dan bantuan uji kompetensi atau sertifikasi kompetensi kursus dan pelatihan yang berkualitas dan proporsional.

g. Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Penyusunan rencana aksi pengembangan sumber daya PAUD dan DIKMAS meliputi unsur-unsur ketenagaan sebagai berikut :

1) Pendidik PAUD dan DIKMAS

- (a) Pamong Belajar, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam rangka pengembangan model/program dan pembuatan percontohan serta penilaian dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program PAUD dan DIKMAS;
- (b) Pendidik PAUD, yaitu tenaga honor yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk menyelenggarakan pembelajaran bagi anak usia dini.
- (c) Instruktur Kursus, yaitu tenaga yang memiliki kompetensi dan sertifikasi pada bidang keterampilan tertentu, yaitu tenaga yang diberi tugas dan kewenangan menyelenggarakan/mengelola pembelajaran pada suatu satuan PAUD dan DIKMAS;
- (d) Tutor, yaitu tenaga yang berasal dari masyarakat yang bertugas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi proses pembelajaran pada pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C), serta pendidikan keaksaraan fungsional.

2) Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS

Tenaga kependidikan PAUD dan DIKMAS yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan PAUD dan DIKMAS. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan

dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan PAUD dan Dikmas.

Tenaga kependidikan PAUD dan DIKMAS di Daerah Nusa Tenggara Timur meliputi:

- a) Penilik, yaitu PNS yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilikan PAUD yang sering juga disebut Penilik PAUD;
- b) Kepala SKB/SPNF ,yaitu PNS yang menjabat sebagai tenaga fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas dan tanggung jawab,wewenang dan hak tambahan secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk memimpin SKB./SPNF;
- c) Tenaga administrasi pada SKB, yaitu PNS yang diberi tugas dan tanggung jawab ,wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang melaksanakan administrasi di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- d) Pengelola atau Tenaga administrasi pada kelompok belajar pada satuan PAUD dan Dikmas , yaitu orang yang mendirikan, mengelola, mengadministrasikan kegiatan guna menunjang penyelenggaraan kelompok belajar tersebut;
- e) Pengelola atau tenaga administrasi pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yaitu orang yang mendirikan, mengelola dan mengadministrasi kegiatan guna menunjang penyelenggaraan PKBM;
- f) Pengelola atau tenaga administrasi pada Taman Bacaan Masyarakat (TBM), yaitu orang yang mendirikan, mengelola dan mengadministrasi kegiatan guna menunjang penyelenggaraan TBM.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

BP PAUD dan DIKMAS Nusa Tenggara Timur merupakan UPT yang baru saja bergabung dengan Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS sejak 1 Januari 2017. Sebagai lembaga baru tentunya BP PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Timur memerlukan waktu untuk beradaptasi dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya.

Namun sejalan dengan tuntutan masyarakat akan mutu pengembangan program dan model PAUD dan DIKMAS serta peningkatan sumber daya manusia yang semakin tinggi, BP-PAUD dan DIKMAS Nusa Tenggara Timur berusaha untuk tetap menjaga kualitas penyelenggaraan program pengembangan PAUD dan DIKMAS dengan sebaik-baiknya.

1. Potensi BP PAUD dan DIKMAS

BP PAUD dan DIKMAS Nusa Tenggara Timur dalam membuat renstra juga melihat kekuatan dan kelemahan yang ada untuk menjalankan program sesuai dengan acuan yang telah di rencanakan,yaitu dengan melihat:

a. Potensi Historis

Sebelum menjadi UPT Pusat dari Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, BP PAUD dan Dikmas NTT merupakan UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT yang bertugas melaksanakan pengembangan, dan pembinaan Pendidikan Nonformal dan Informal serta pendidikan khusus di Daerah Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya sehubungan dengan pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 maka BPKB dialihfungsikan menjadi UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas melakukan peningkatan mutu program PAUD dan Dikmas sesuai dengan Permendikbud Nomor : 05 Tahun 2017. Sesuai dengan peraturan yang terbaru ini, BP PAUD dan Dikmas sebenarnya memiliki kesamaan tugas pokok dan fungsi dengan

lembaga sebelumnya. Dengan kesamaan ini diharapkan menjadi kekuatan bagi stakeholder terkait guna melaksanakan tugas-tugas sebagai BP PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Timur.

b. SDM, Struktur Organisasi, dan Sarana Prasarana

1) Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia BP PAUD Dikmas NTT adalah sebanyak 41 orang pegawai, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 23 orang dan pegawai perempuan sebanyak 18 orang, yang terdiri dari kelompok jabatan fungsional umum dan kelompok jabatan fungsional tertentu. Jika dilihat dari kualifikasi pendidikannya, maka dapat dilihat pada tabel berikut.

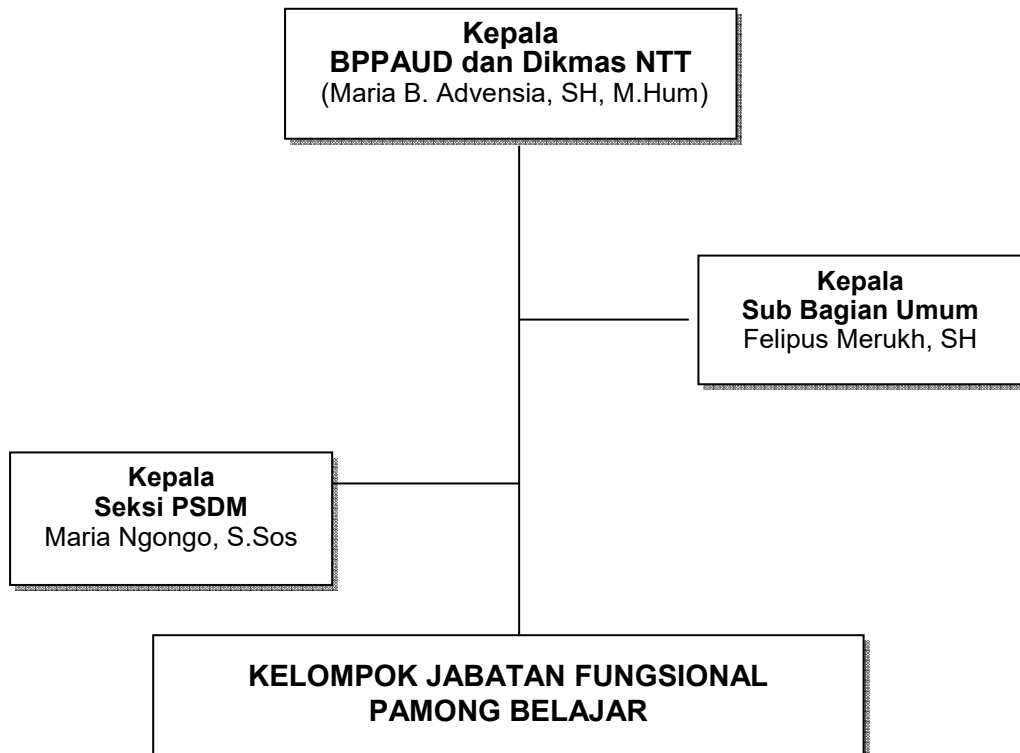
No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Program Doktor (S3)	-	
2	Pascasarjana (S2)	6 orang	
3	Sarjana (S1)	24 orang	
4	Diploma (D1-D3)	2 orang	
5	SLTA sederajat	9 orang	
6	SLTP sederajat	- orang	
	Total	41 orang	

Selanjutnya dari 41 Jumlah pegawai tersebut, jika dilihat dari pangkat dan golongannya adalah 16 orang golongan IV, 16 orang golongan III, dan 7 orang golongan II.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat dalam melaksanakan tugasnya, didukung oleh tenaga fungsional yaitu Pamong Belajar.

2) Struktur Organisasi

Secara kelembagaan BP-PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Timur memiliki Struktur organisasi sebagai berikut :



3) Sarana Prasarana

Sarana prasarana yang dimiliki oleh BP PAUD dan Dikmas NTT yang digunakan dan dimanfaatkan sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Gedung Perkantoran	1 Unit	
2	Gedung Pertemuan	3 unit	
3	Gedung Perpustakaan	1 Unit	
4	Asrama	6 Unit	
5	Ruang Makan	1 Unit	
6	Tempat Ibadah	1 Unit	
7	Guest House	2 Unit	

2. Permasalahan

Kegiatan pembinaan program PAUD dan Dikmas NTT tidak lepas dari permasalahan dan kendala. Berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi diri yang dilaksanakan oleh BP PAUD dan Dikmas NTT maka dapat diuraikan permasalahan sebagai berikut:

- a. Untuk layanan pendidikan anak usia dini
 - Masih ada lembaga/satuan PAUD yang belum mengikuti akreditasi.
 - Masih ada lembaga PAUD yang belum dikelola secara profesional sehingga memberikan layanan pendidikan kurang maksimal bagi masyarakat.
- b. Untuk layanan pendidikan masyarakat
 - Masih ada penduduk yang belum memiliki pendidikan setara SD, SMP dan SMA;
 - Masih ada Kabupaten/kota yang belum menerapkan pengarusutamaan gender bidang pendidikan dan pendidikan keorangtuaan (parenting education).
 - Masih banyak peserta didik pendidikan keaksaraan dasar dan lansia yang belum memperoleh layanan kecakapan hidup sesuai minat dan kemampuannya.
- c. Untuk program kursus dan pelatihan
 - Masih ada pemuda usia produktif yang belum mempunyai keterampilan dan kecakapan kerja.
 - Masih banyak peserta didik kursus dan pelatihan yang belum memperoleh sertifikat kompetensi.
- d. Untuk layanan pembinaan pendidik dan tenaga guru dan kependidikan
 - Masih banyak guru dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas yang belum mengikuti diklat teknis.
 - Masih banyak guru dan tenaga kependidikan PAUD dan DIKMAS yang belum mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada maka dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penguatan tata kelola,transparan,akuntabilitas serta system pengendalian manajemen, dalam rangka penjaminan mutu dan efisiensi program BP-PAUD dan DIKMAS;
2. Layanan pengkajian, pengembangan dan pengendalian mutu di BP-PAUD danDIKMAS;
3. Peningkatan kompetensi dalam rangka peningkatan perluasan akses layanan PTK- PAUD dan DIKMAS;
4. Peningkatan kualifikasi GTK-PAUD dan DIKMAS dalam rangka peningkatan mutu dan relevansi menurut jenisnya;
5. Peningkatan wawasan GTK-PAUD melalui kebijakan wawasan GTK-PAUD danDIKMAS melaluipengembangan profesi, workshop, lokakarya, dll;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana PAUD dan DIKMAS di satuan PAUD;
7. Melakukan fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana di bidang PAUD dan Dikmas.

3. Tantangan di bidang PAUD dan Dikmas

PAUD dan DIKMAS mencakup pendidikan anaku sia dini,pendidikan masyarakat, kursus dan pelatihan dan pendidikan keluarga.

a. Tantangan dibidang PAUD

1. Meningkatkan pengelolaan layanan pendidikan bagi anak usia 3-6 tahun sesuai standa rnasional,yang berkesetaraan gender,berwawasan pendidikan pembangunan.

2. Model/program dan bahan ajar PAUD dan POD yang bermutu, berkesetaraan gender, berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) serta dapat diterapkan diberbagai daerah/wilayah.
 3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Ditjen PAUD dan DIKMAS
- b. Tantangan dibidang Dikmas
1. Meningkatkan jumlah penduduk usia produktif yang memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup untuk bekerja dan berwirausaha yang berstandar nasional, berkesetaraan.
 2. Meningkatkan remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan masyarakat yang berkualitas, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan(ESD) diseluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota.
 3. Meningkatkan jumlah Penduduk usia dewasa yang memperoleh layanan pendidikan keorangtuaan dalam rangka meningkatkan wawasan, pemahaman tentang kiat mendidik anak sejak janin hingga dewasa.
 4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Ditjen PAUD dan Dikmas.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 05 Tahun 2017 pasal 2 ayat (1) bahwa Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas untuk melaksanakan pengembangan program dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Memperhatikan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab satu, pasal satu, butir dua, bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan Nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Menindaklanjuti kebijakan Presiden Republik Indonesia yang dikemas dalam RPJMN 2015-2019 oleh BAPENAS tentang perwujudan pembangunan Indonesia yang berkualitas. Memperhatikan Rancangan Teknokratik Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015-2019 yang dilaksanakan di Bali pada tanggal, 25 s.d 27 November 2014.

Berpijak dari uraian tersebut diatas Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Timur merumuskan Visi sebagai berikut "

**TERWUJUDNYA PAUD DAN DIKMAS YANG BERMUTU,
BERKARAKTER, DINAMIS, MELALUI PELIBATAN PUBLIK
DAN GOTONG ROYONG"**

Maka makna yang terkandung dalam visi balai diantaranya : bermutu yang dimaksud adalah berkualitas, bertaraf tinggi artinya Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan masyarakat dapat dipercaya dan diperlukan oleh

pemangku kepentingan dengan taraf atau derajat yang tinggi. Sedangkan berkarakter adalah watak atau sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti dan tabiat baik yang dimiliki oleh insan PAUD dan Dikmas baik sebagai pelayan maupun sebagai pihak yang dilayani. Adapun Dinamis yang dimaksud adalah penuh semangat, tenaga yang energik sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan.

BP PAUD dan Dikmas NTT dalam melaksanakan kegiatan dan memberikan pelayanannya tidaklah sendirian, akan tetapi dibangun jaringan kemitraan yang solid dan saling menguntungkan, semua pihak terkait khususnya pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta, komunitas dan pribadi masyarakat dilibatkan dalam hal kegiatan kreatif dan dilakukan bersama-sama secara efektif dan efisien.

B. MISI

Untuk mencapai Visi BP PAUD dan Dikmas NTT Tahun 2015 – 2019 ditetapkan 8 (delapan) misi yang merupakan rumusan umum dari upaya pencapaiannya yakni :

1. Memetakan mutu satuan PAUD dan Dikmas yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.
2. Melaksanakan supervisi untuk percepatan standarisasi satuan PAUD dan Dikmas.
3. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program PAUD dan Dikmas yang efektif dan efisien.
4. Mengembangkan sumber daya PAUD dan Dikmas yang berkarakter dan berkomitmen tinggi.
5. Mengelola sistem informasi PAUD dan Dikmas yang aktual, cepat, tepat dan bermanfaat.
6. Melakukan kemitraan di bidang PAUD dan Dikmas yang saling menguntungkan.

7. Memberikan layanan PAUD dan Dikmas sesuai kebutuhan masyarakat.
8. Mengembangkan program PAUD dan Dikmas yang berkualitas dan bermanfaat.

C. TUJUAN STRATEGIS

Dalam upaya merealisasikan visi dan misi BP PAUD dan Dikmas NTT dirumuskan tujuan strategis Tahun 2015-2019 yang lebih jelas guna menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi yakni sebagai berikut:

1. Menyiapkan SDM PAUD Dikmas yang kompeten dan sesuai dengan visi
 - a. Sumber daya manusia PAUDNI di lingkungan Balai yang berkualifikasi, berkompoten, professional dan sesuai dengan tata nilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - b. Sumber daya GTK BP PAUD dan Dikmas di wilayah NTT sesuai dengan tuntutan masyarakat.
2. Menyiapkan sarana prasarana kerja yang memadai
 - a. Menyusun grand desain sarana dan prasarana sebagai pendukung konsep percontohan.
 - b. Melengkapi infrastuktur sebagai sarana peningkatan dan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.
3. Menyiapkan SDM yang profesional dan penuh kreativitas
 - a. Pelaksanaan peta kompetensi SDM Balai sesuai Jabatan, kualifikasi dan kompetensi.
 - b. Peningkatan kompetensi SDM Balai sesuai visi.
 - c. Peningkatan SDM GTK PAUD di wilayah kerja BP PAUD Dikmas NTT yang berkualitas.
 - d. Peningkatan SDM GTK Dikmas di wilayah kerja BP PAUD Dikmas NTT yang berkualitas.

- e. Pengembangan kreativitas kerja SDM GTK PAUD di wilayah kerja BP PAUD Dikmas NTT yang berkualitas.
 - f. Pengembangan kreativitas kerja SDM GTKDikmas di wilayah kerja BP PAUD Dikmas NTT yang berkualitas.
4. Melaksanakan budaya kerja profesional
 - a. Peningkatan disiplin kerja SDM Balai sesuai jabatan.
 - b. Pengembangan budaya kerja profesional SDM GTK PAUD Dikmas NTT yang bermutu.
 - c. Menyusun rencana strategis Balai sesuai kebijakan Ditjen PAUD Dikmas dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - d. Menyusun rencana kegiatan pertahun sesuai kebutuhan masyarakat.
 - e. Melakukan evaluasi kinerja Balai secara berkelanjutan.
 5. Menjalin jejaring kerja untuk mencapai tujuan organisasi
 - a. Menjalin jejaring kemitraan untuk pengembangan SDM PAUD dan Dikmas di wilayah kerja Balai.
 - b. Mempublikasi prestasi kerja guna mendukung eksistensi Balai PAUD dan Dikmas NTT.
 6. Pengembangan pelayanan bagi masyarakat yang prima
 - a. Pengelolaan administrasi pekerjaan berbasis IT.
 - b. Pelayanan prima sesuai tuntutan masyarakat.

D. SASARAN STRATEGIS

Kebijakan strategi BP PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Timur tahun 2015-2019 disusun berdasarkan pada kebijakan strategis Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu penyusunan kebijakan program yang dikerjakan Balai senantiasa harus relevan, berkaitan, berkontribusi dan saling mendukung.

Untuk itu pijakan strategi program Balai adalah sebagai berikut;

1. Untuk layanan Pendidikan anak usi adini

- a. Anak Usia 0-6 tahun, dengan prioritas usia 3-6 tahun.
 - b. Lembaga PAUD yang belum terakreditasi.
2. Untuk layanan Pendidikan Masyarakat
 - a. Penduduk buta aksara usia 15-59 tahun.
 - b. Penduduk dewasa yang belum memiliki pendidikan setara SD, SMP, dan SMA.
 - c. Penduduk perempuan keaksaraan dasar dan lansia yang belum memperoleh layanan kecakapan hidup.
 3. Untuk program kursus dan pelatihan
 - a. Pemuda usia produktif baik di desa maupun di perkotaan, yang belum mempunyai keterampilan dan kecakapan kerja.
 - b. Peserta didik Kursus dan Pelatihan yang belum memperoleh sertifikat kompetensi.
 - c. Lembaga kursus dan pelatihan (LKP) yang belum terakreditasi.
 4. Untuk layanan pembinaan pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS
 - a. Pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan DIKMAS mengikuti diklat teknis.
 - b. Pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan DIKMAS yang belum mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan.
 5. Penguatan tatakelola, transparan, akuntabilitas serta system pengendalian manajemen, dalam rangka penjaminan mutu dan efisiensi program PAUD dan DIKMAS.
 - a. Dokumen rencana program, anggaran dan evaluasi kinerja PAUD dan DIKMAS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Pengendalian daya serap anggaran.
 - c. Penerapan e-keuangan, e-pepegawaian, e-administrasi umum.

- d. Kesesuaian laporan keuangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Ketertiban BP PAUD dan DIKMAS dalam pengelolaan BMN.
 - f. Pengendalian pegawai BP PAUD dan DIKMAS dalam melaksanakan tugas pada hari kerja.
 - g. Pengendalian perencanaan anggaran BP PAUD dan Dikmas NTT yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dukungan data yang memadai.
6. Layanan pengkajian, pengembangan dan pengendalian mutu PAUD dan DIKMAS
- a. Model pembelajaran dan program percontohan PAUD dan DIKMAS yang dikembangkan di wilayah BP PAUD dan Dikmas NTT.
 - b. Model strategi peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD DAN DIKMAS NTT.
 - c. Lembaga PAUD dan DIKMAS yang mendapatkan pembinaan dan pengendalian mutu.
 - d. Monitoring, Supervisi dan Evaluasi merupakan kegiatan pembinaan sekaligus pengendalian agar penyelenggaraan program PAUD dan DIKMAS tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat guna.
7. Peningkatan Kompetensi
- Kebijakan strategis: meningkatkan mutu GTK-PAUD dan DIKMAS, dalam rangka peningkatan perluasan akses layanan GTK-PAUD dan DIKMAS. Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut perlu dikembangkan melalui:
- a. Mendorong usaha-usaha pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan kompetensi GTK-PAUD dan DIKMAS yang berada di daerahnya.
 - b. Menyusun kegiatan berbasis data GTK-PAUD dan DIKMAS.

- c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis bagi GTK- PAUD dan DIKMAS yang dilaksanakan secara regional.
 - d. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis bagi GTK- PAUD dan DIKMAS yang dilaksanakan ditingkat provinsi dan tingkat Kab/Kota.
 - e. Peningkatan kerjasama dengan instansi/orsos/lembaga lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi GTKPAUD dan DIKMAS.
8. Peningkatan Kualifikasi
- Kebijakan strategis: meningkatkan kualifikasi pendidikan GTK PAUD dan DIKMAS, dalam rangka peningkatan mutu dan relevansi menurut jenisnya.
9. Peningkatan Wawasan
- Kebijakan strategis: meningkatkan wawasan GTK-PAUD dan DIKMAS. Untuk Peningkatan wawasan GTK-PAUD dan Dikmas melalui pengembangan profesi, studi lanjut, workshop, lokakarya, dan sebagainya.
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana PAUD dan Dikmas disatukan PAUD dan Dikmas NTT.
- Kebijakan strategis: meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan PAUD dan DIKMAS, dilakukan melalui kegiatan:
- a. Identifikasi kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan PAUD dan DIKMAS.
 - b. Mengembangkan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana di bidang PAUD dan DIKMAS.
11. Melakukan fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana di bidang PAUD dan DIKMAS.

TUSI LEMBAGA	VISI	INDIKATOR VISI	MISI
Melaksanakan pengembangan program dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat	Terwujudnya PAUD dan Dikmas yang bermutu, berkarakter, dinamis melalui Pelibatan publik dan gotong royong	1. Bermutu : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan program Paud dan Dikmas dilakukan berdasarkan Perdirjen Paud dan Dikmas nomor 5 Tahun 2017 sehingga berkualitas dan bertaraf tinggi. b. Hasil Pengembangan program dapat dijadikan sebagai reference untuk memperkaya materi pembelajaran pada satuan Paud dan Dikmas c. Tenaga Fungsional Pamong Belajar memiliki ,kualifikasi ,kompetensi dan pengalaman yang memadai dalam bidang pengembangan program Paud dan Dikmas d. Tenaga Fungsional umum memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai sesuai dengan bidang tugasnya e. Layanan public dilakukan sesuai dengan SOP yang disyaratkan f. Layanan management perkantoran,kepegawaian, BMN, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memetakan mutu satuan PAUD dan Dikmas yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. 2. Melaksanakan supervisi untuk percepatan standarisasi satuan PAUD dan Dikmas. 3. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program PAUD dan Dikmas yang efektif dan efisien. 4. Mengembangkan sumber daya PAUD dan Dikmas yang berkarakter dan berkomitmen tinggi. 5. Mengelola sistem informasi PAUD dan Dikmas yang aktual, cepat, tepat dan bermanfaat. 6. Melakukan kemitraan di bidang PAUD dan Dikmas yang saling menguntungkan. 7. Memberikan layanan PAUD dan Dikmas sesuai kebutuhan masyarakat.

TUSI LEMBAGA	VISI	INDIKATOR VISI	MISI
		<p>2. Berkarakter</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Memiliki kreatifitas dan inovasi dalam bekerja c. Memiliki jiwa berkompetisi dalam bekerja d. Memiliki motivasi berprestasi untuk berkembang e. Menyukai tantangan dalam pekerjaan <p>3. Dinamis</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Program dilaksanakan dengan melibatkan mitra kerja terkait baik pemerintah maupun masyarakat b. Keterbukaan dan transparansi untuk hal-hal yang harus diketahui oleh public c. Terbuka bagi setiap koreksi / masukan yang diberikan oleh masyarakat untuk penyempurnaan program dan layanan yang diberikan oleh BP Paud dan Dikmas 	<p>8. Mengembangkan program PAUD dan Dikmas yang berkualitas dan bermanfaat.</p>

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA REGULASI, KERANGKA PENDANAAN
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAHKEBIJAKAN BP PAUD DAN DIKMAS NTT

Arah kebijakan Rencana Strategis Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas NTT tahun 2015 - 2019, berpijak pada beberapa arah kebijakan antara lain : (1) Hasil analisis Renstra Ditjen PAUDNI 2010 -2014. (2) Arah kebijakan Ditjen PAUD dan Dikmas, dirumuskan berdasarkan pada RPJMN 2015-2019.

Arah kebijakan pembangunan dari BP PAUD dan DIKMAS Nusa Tenggara Timur tahun 2015-2029 adalah bsebagai berikut:

1. ARAH KEBIJAKAN PENATAAN SDM

- a. SDM BP PAUD dan Dikmas NTT
 1. Peta Kompetensi SDM BPPAUD Dikmas NTT.
 2. Peningkatan substansi teknis melalui pelatihan, magang, pendampingan, dan penugasan.
 3. Pengembangan karier SDM BP PAUD dan Dikmas sesuai ketentuan.
- b. SDM GTKdi wilayah Binaan BP PAUD dan Dikmas NTT
 1. Pemetaan mutu GTK PAUD dan Dikmas di wilayah kerja BP PAUD Dikmas NTT.
 2. Peningkatan mutu GTK PAUD dan Dikmas melalui pengembangan unit percontohan.
 3. Peningkatan mutu GTK PAUD dan Dikmas melalui labsite percontohan.

2. ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PAUD

- a. Pengembangan program PAUD yang bermutu dan menjamin layanan prima bagi masyarakat.
 1. Pengembangan program yang memenuhi standar nasional pendidikan/terakreditasi.
 2. Pengembangan Program berorientasi pada peningkatan mutu layanan dan kebijakan lokal.
- b. Perluasan dan peningkatan mutu labsite berbasis percontohan

1. Labsite sebagai media rujukan pemecahan masalah di lapangan.
2. Fasilitasi penempatan Labsite di kabupaten/kota.
- c. Perluasan jejaring kemitraan untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif
 1. Menggalang kemitraan dengan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/ Kota.
 2. Menggalang program-program PAUD dan Dikmas melalui kemitraan untuk pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat dengan dinas terkait.

3. ARAHKEBIJAKAN PROGRAM PENDIDIKAN MASYARAKAT

1. Pengembangan program pendidikan masyarakat yang bermutu dan profesional.
2. Perluasan dan peningkatan mutu labsite pendidikan masyarakat berbasis percontohan.

B. KERANGKA REGULASI.

Kerangka regulasi yang mendukung dan melandasi penyusunan Renstra BP PAUD dan DIKMAS Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
11. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
12. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015–2019;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015–2019;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 05 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas.

C. KERANGKA PENDANAAN DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka Pendanaan implementasi Renstra BP PAUD dan Dikmas 2015 s.d.2019 mencakup: (i) strategi pendanaan pendidikan; (ii) koordinasi, system tata kelola dan pengawasan internal,serta (iii) sistem monitoring dan evaluasi yang menjamin terlaksananya fungsi serta tercapainya tujuan PAUD dan DIKMAS,dan (iv) Pemanfaatan Teknologi dan Informasi.

1. Strategi Pendanaan Pendidikan PAUD dan DIKMAS

a. Prinsip Pendanaan Pendidikan

Dalam implementasinya BP PAUD dan DIKMAS NTT menerapkan prinsip pendanaan pendidikan dengan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas public dalam pengelolaanya. Adapun sumber pendanaan BP

PAUD dan Dikmas NTT ditentukan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, kecukupan dan keberlanjutan.

b. Rencana Pendanaan

Rencana pendanaan BP PAUD dan Dikmas NTT dalam kurun waktu 2015–2019 mengacu pada Renstra Ditjen PAUD dan DIKMAS yang telah ditetapkan adapun perencanaan anggaran akan diprioritaskan untuk Pengembangan program PAUD dan Dikmas.

Pengukuran keberhasilan penerapan strategi pendanaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat BP PAUD dan Dikmas dilakukan dengan merumuskan indicator dan target pencapaian dijabarkan sebagai berikut:

RENCANA KERJA BP PAUD DAN DIKMAS NTT TAHUN 2015 – 2019

KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KEGIATAN				
					VOLUME				
					2015	2016	2017	2018	2019
	Pengembangan program Paud dan Dikmas	1. Pengembangan program Paud dan Dikmas dilakukan berdasarkan prosedur yang tertuang dalam Perdirjen Paud dan Dikmas No.5/2017 2. 100% Pengembangan program Paud dan Dikmas dapat diselesaikan tepat waktu	1. Hasil Pengembangan program Paud dan Dikmas digunakan pada satuan Paud dan Dikmas di wilayah kerja BP Paud dan Dikmas NTT 2. Tersedianya laporan hasil pengembangan program Paud dan Dikmas	Model	-	-	7	7	6
	Pemetaan Mutu Satuan Paud dan Dikmas	100% lembaga sasaran terpetakan mutunya	1. Tersedianya laporan hasil analisis pelaksanaan pemetaan mutu satuan Paud dan Dikmas	Lembaga	-	-	250	266	450
	Supervisi satuan Paud dan Dikmas	1. 100% sasaran pemetaan mutu satuan Paud dan Dikmas dijadikan sasaran supervisi 2. Terlaksananya supervise pada 100% lembaga sasaran supervisi	1. Tersedianya laporan analisis hasil pelaksanaan supervise satuan Paud dan Dikmas 2. 100% lembaga sasaran supervise mampu memenuhi semua indikator sesuai ketentuan 8 standar nasional Pendidikan dan dapat diakreditasi	Lembaga	-	-	250	266	450

	Kemitraan dengan satuan Paud dan Dikmas	Terlaksanannya program kemitraan dengan satuan Paud dan Dikmas sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis dari Kepala BP Paud dan Dikmas NTT	1. Tersedianya laporan pertanggungjawaban anggaran dari lembaga penerima 2. Mutu penyelenggaraan program semakin meningkat	Lembaga	-	-	3	11	16
	Pengembangan Sumber Daya PTK Paud dan Dikmas	Program dilaksanakan berdasarkan hasil kajian terhadap mutu PTK Paud dan Dikmas	1. Adanya peningkatan kompetensi PTK Paud dan Dikmas 2. Tersedianya laporan pelaksanaan program sesuai dengan jenis kegiatan	orang	-	-	182	264	300
	Pengembangan sarana dan Prasarana BP Paud dan Dikmas NTT	Program dilaksanakan berdasarkan hasil kajian dan analisis teknis dari lembaga yang teknis yang berwenang	1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai 2. Tersedianya sarana dan prasarana yang nyaman dan aman untuk aktifitas perkantoran maupun untuk layanan publik	Gedung	-	-	4	1	6

2. Koordinasi, Sistem Tata Kelola, dan Pengawasan Internal PAUD dan Dikmas

Koordinasi, tata kelola dan pengawasan internal tersebut harus secara terus menerus ditingkatkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara maksimal. Keberhasilan dalam mengimplementasikan Renstra sangat tergantung pada komitmen dalam proses penyusunan dan penjabarannya oleh pengambil keputusan dalam kebijakan, baik program, kegiatan institusi, dan penerimaan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Implementasi koordinasi, system tata kelola, dan pengawasan internal dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Koordinasi Perencanaan Program PAUD dan Dikmas

Kegiatan koordinasi perencanaan penyusunan Renstra di BP PAUD dan DIKMAS NTT dilakukan melalui workshop Rapat Kerja Tahunan (RKT) BP PAUD dan DIKMAS NTT. Pokok pembahasannya adalah arah kebijakan di BP PAUD dan DIKMAS, sasaran program dan program kerja, serta monitoring dan evaluasi tahunan di BP PAUD dan DIKMAS NTT.

b. Sistem Tata Kelola

Implementasi system tata kelola pada Renstra BP PAUD dan Dikmas NTT 2015–2019 dapat dilakukan melalui:

- 1) Penguatan system tata kelola dan system pengendalian manajemen di Satuan Kerja BP PAUD dan Dikmas NTT.
- 2) Penguatan tata kelola dan system pengendalian manajemen di BP PAUD dan DIKMAS NTT.
- 3) Menjamin kepastian memperoleh layanan program kegiatan yang lebih baik.

Dalam rangka menjamin kepastian memperoleh layanan program kegiatan yang lebih baik, arah kebijakan yang ditempuh yakni: (1) mengembangkan system penilaian kinerja berbasis mutu produktivitas;

dan (2) memberikan pelayanan yang lebih kondusif dalam mewujudkan transparansi dan akuntabel pengelolaan program GTK-PAUD dan DIKMAS.

c. **Pengendalian dan Pengawasan**

Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan internal yang merupakan tanggungjawab dari unit utama yang membidangi pengawasan yaitu SPI (Satuan Pengawas Internal) BP PAUD dan DIKMAS NTT dan Inspektorat Jenderal Kemendikbud. Disamping pengawasan internal atasan langsung tersebut, pengawasan juga dilakukan oleh pengawasan independen yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) yang bertanggungjawab kepada Presiden dan Badan Pemeriksa Keuangan yang bertanggungjawab kepada DPR-RI.

3. Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat ketercapaian dan kesesuaian pelaksanaan program antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra BP PAUD dan DIKMAS NTT 2015-2019 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui kegiatan dan/atau program PAUD dan DIKMAS. Kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan mencakup aspek (1) penjaminan mutu, relevansi, dan daya saing; (2) pemerataan dan perluasan akses PAUD dan DIKMAS; (3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan kemitraan pendidikan.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh BP PAUD dan DIKMAS NTT dengan sasaran wilayah adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, UPTD Sanggar Kegiatan Belajar dan unit lain yang terkait dengan penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas di wilayah Kerja BP PAUD Dikmas NTT.

BAB V

PENUTUP

Dokumen rencana strategis BP PAUD dan DIKMAS NTT Tahun 2015-2019 disusun sebagai perwujudan komitmen organisasi dalam menjawab tantangan penyelenggaraan program bidang PAUD dan DIKMAS di NTT. Renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta situasi dan kondisi BP PAUD dan Dikmas berada.

Penyusunan Rencana Strategis BP PAUD dan DIKMAS NTT disusun dan dirancang melalui proses pemikiran, kegiatan dan tindakan yang dinamis dalam rangka penentuan sasaran, sarana, pengalokasian dana, daya, ruang, waktu dan organisasi yang setepat-tepat untuk mencapai tujuan. Dengan tersusunnya dokumen Renstra yang berkualitas dengan berbasis mutu memungkinkan BP PAUD dan DIKMAS NTT mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara terprogram, terpadu, bertahap, dan berkelanjutan dengan mengedepankan akuntabilitas, pencitraan publik, kejujuran, objektivitas, dan kebermaknaan secara efektif, efisien, sistematis, dan sistemik.

Akhirnya, melalui Renstra BP PAUD dan DIKMAS NTT diharapkan capaian kinerja Ditjen PAUD dan DIKMAS, Satuan Pendidikan (Provinsi, Kabupaten/Kota) di wilayah kerja BP PAUD dan DIKMAS NTT baik secara kualitas maupun kuantitas semakin lebih baik, dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkannya.